

Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Wan Hermanto ^{1*} ; Sujianto ² ; Hasim As'ari ³

^{1,2,3} Program Studi Magister Administrasi Publik , Universitas Riau, Riau, Indonesia; whermanto26@gmail.com

*Correspondence : whermanto26@gmail.com

ABSTRAK

Wilayah pesisir memiliki potensi terutama tentang isu lingkungan. Selain memiliki potensi Sumber Daya Alam, wilayah pesisir pulau juga memiliki permasalahan terutama pada isu Abrasi. Wilayah pesisir pulau yang diangkat adalah Pulau Bengkalis, Riau (Wilayah terluar perbatasan negara) bagian dari Provinsi Riau secara geografis dipilih merupakan wilayah pulau pesisir. Hasil dokumentasi melalui studi lapangan menunjukkan adanya ancaman yang serius terkait isu lingkungan terutama pada kerusakan hutan mangrove efek dari faktor alam Abrasi, serta upaya pengelolaan kebijakan tentang hutan mangrove yang kurang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengeksplorasi Strategi pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan untuk identifikasi kendala apa yang dihadapi dalam Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode penelitian deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh langsung melalui wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Tidak terlepas dari partisipasi masyarakat melalui Kelompok LSM IPMPL (Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan) Kecamatan Bantan dalam mengelola dan memelihara hutan mangrove di wilayah mereka. Jenis partisipasi yang diberikan berupa tenaga, harta benda, uang, buah pikiran, dan keterampilan.

Kata kunci

Strategi, Pengelolaan Mangrove, Kebijakan

ABSTRACT

Coastal areas have potential, especially regarding environmental issues. Apart from having natural resource potential, the island's coastal areas also have problems, especially on the issue of abrasion. The coastal area of the island that was appointed was Bengkalis Island, Riau (the outermost area of the state border) part of the Riau Province. Geographically, it was chosen as a coastal island area. The results of documentation through field studies indicate that there is a serious threat related to environmental issues, especially in the destruction of mangrove forests due to the natural factor of abrasion, as well as efforts to manage policies regarding mangrove forests that are lacking. The purpose of this study was to analyze and explore the Mangrove Forest Management Strategy in Bantan District, Bengkalis Regency and to identify the obstacles encountered in the Mangrove Forest Management Strategy in Bantan District, Bengkalis Regency. This study uses a qualitative descriptive research method approach. Primary data was obtained directly through interviews. The results of this study indicate that it is inseparable from community participation through the IPMPL NGO Group (Malay Youth Association Concerning the Environment) in Bantan District in managing and maintaining mangrove forests in their area. The types of participation provided are in the form of labor, property, money, ideas, and skills.

Keywords

Strategy, Mangrove Management, Policy

Pendahuluan

Hutan merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sebagai suatu kesatuan ekosistem hutan memiliki banyak manfaat serbaguna bagi umat manusia, karena itu keberadaan hutan wajib dijaga kelestariannya, serta dimanfaatkan secara optimal untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Berdasarkan data dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bahwa Populasi hutan di Indonesia mencapai 95,6 juta hektar atau 50,9% dari total daratan, dimana 92,5% dari total luas hutan atau 8,4 juta hektar berada dalam kawasan hutan. Jenis-jenis hutan di Indonesia bermacam ragam, seperti hutan bakau, hutan mangrove, hutan lumut, hutan rawa, hutan sabana, hutan stepa, hutan musim, hutan hujan tropis dan hutan gugur. (Afriyani, 2018)

Sebagaimana diketahui sebagian besar wilayah Kabupaten Bengkalis berada pada kawasan pesisir pantai dan pinggir sungai. Kondisi ini menyebabkan kabupaten dikenal dengan Negeri Junjungan ini, menjadi lahan subur bagi perkembangan biakan dan pertumbuhan ekosistem hutan mangrove. (Leo, 2008) Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bengkalis tahun 2021, luas lahan hutan mangrove mencapai 41.718 hektar yang tumbuh tersebar di pesisir pantai maupun pinggir sungai. (Hery Purnobasuki, 2005) Kawasan hutan mangrove ini memberikan dampak penting bagi kelangsungan ekosistem, salah satu fungsi ekologis ekosistem mangrove yang paling penting dalam bidang perikanan adalah sebagai penyedia unsur hara bagi ekosistem perairan pesisir dan sekitarnya. (Sundawati L, 2016)

Tabel 1. Kerusakan hutan mangrove yang ada di Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

No.	Kecamatan	Luas Kerusakan (Ha)
1.	Rupat Utara	25,3
2.	Rupat	1,5
3.	Bantan	20,7
4.	Bengkalis	0,5
5.	Mandau	3
6.	Pinggir	5,3
7.	Siak Kecil	7,8
8.	Bukit Batu	-
Jumlah		64,1

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup 2021

Berdasarkan data tabel di atas ternyata kerusakan hutan mangrove Kabupaten Bengkalis mencapai 64,1 hektar. Tentu kondisi ini, perlu perhatian serius dari seluruh elemen negeri ini, mulai dari tataran pemerintah, masyarakat maupun lembaga peduli lingkungan. Salah satu kerusakan kawasan hutan mangrove terjadi di Kecamatan Bantan yang menjadi fokus peneliti pada penelitian ini, yakni seluas 20,17 hektar. Hampir setiap tahun, kawasan hutan mangrove terus berkurang. Kondisi ini

berdampak pada ekosistem, bahkan mengakibatkan abrasi pantai di kawasan pesisir pantai di Kecamatan Bantan yang berhadapan langsung dengan gelombang perairan Selat Melaka. Oleh karena itu, dalam rangka pemanfaatan ekosistem mangrove diperlukan suatu pengelolaan ekosistem mangrove yang baik dan benar.

Kepala Desa Muntai Barat Subari saat diwawancarai peneliti sebagai pendukung penelitian (08 Juli 2022), menjelaskan bahwa Kurangnya koordinasi dan sosialisasi antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan masyarakat serta organisasi pemeliharaan hutan mangrove terhadap pengelolaan hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis terutama masyarakat di Kecamatan Bantan.

Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa kurangnya sosialisasi dan pembinaan oleh instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan KPHP (Kesatuan pengelolaan Hutan Produksi) membuat pengelolaan hutan di Kabupaten Bengkalis terutama pada Kecamatan bantan kurang berjalan, sehingga sebagaimana dalam peraturan daerah Kabupaten Bengkalis No 5 Tahun 2018 pasal 6 (2) "Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dilaksanakan dan dikoordinasi oleh instansi yang berwenang di bidang lingkungan hidup secara terpadu.

Pengelolaan hutan mangrove merupakan salah satu strategi pengelolaan dalam bentuk perlindungan hutan yang dapat meningkatkan efisiensi dan keadilan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam. Indikator penting dalam strategi pengelolaan hutan mangrove adalah partisipasi masyarakat sebagai penggerak. Ada banyak variabel yang diperkirakan saling berinteraksi dan berkorelasi dalam partisipasi masyarakat tersebut. Oleh karenanya penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menentukan indikator utama dalam pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat.

Strategi yang digunakan oleh masyarakat yaitu dengan melakukan penanaman Kembali bibit mangrove di sekitaran bibir pantai baik yang dikelola oleh masyarakat sekitar, pemerintah serta dengan kemitraan yang terkait. masyarakat sudah pernah melakukan penanaman mangrove secara swadaya(Arief, 2004). Ada yang mengambil anakan tanaman mangrove yang masih tersisa di wilayah tersebut. Sebagian lagi ada yang membudidayakan dan sstrategi yang telah dilakukan oleh pihak pemerintah dengan kemitraan yaitu salah satunya adalah program MERA (Mangrove Ecosystem Restoration Aliance) yang fokus pada pemulihan lingkungan dan pengembangan SDM masyarakat pesisir serta peningkatan pendapatan mata pencaharian masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengeksplorasi Strategi pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis dan untuk identifikasi kendala apa yang dihadapi dalam Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

Andrew. F. Sikula (1985) menjelaskan bahwa pengelolaan adalah aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, penempatan, pengarahan, pemotivasian komunikasi dan pengambilan keputusan yang dilakukan setiap

organisasi yang bertujuan untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh organisasi sehingga menghasilkan suatu produk atau jasa secara efisien (David, 2010) Sedangkan menurut Kiyosaki dan Lechter (2005:104), bahwa pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi. Menurut Leiper dalam Diarta (2009) pengelolaan merujuk pada peranan atau fungsi yang melekat pada peran tersebut yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang. (Chaster, 2002) pengelolaan adalah seni menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan, dimana penyelesaian tersebut terdapat tiga faktor yaitu: (Mas Roro Lillik, 2005) a. Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian, pengendalian dan pengawasan. B. Penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. c. Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan. (Hendropuspita, 2000)

Wilayah pesisir yang digunakan di Indonesia adalah wilayah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin, sedangkan kearah laut wilayah pesisir mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (Dahuri et al., 2001). Menurut (Harry, 2001) hutan mangrove adalah hutan yang terdapat di sepanjang pantai atau muara sungai dan dipengaruhi oleh gerakan pasang surut perpaduan antara air sungai dan air laut, yang tergenang pasang dan bebas dari genangan pada saat surut yang komunitasnya bertoleransi terhadap garam. Sungai mengalirkan air tawar untuk mangrove, dan pada saat pasang pohon mangrove dikelilingi oleh air garam atau air payau. (Gunarto, 2004). Ekosistem mangrove memiliki produktifitas cukup tinggi sehingga mampu menyediakan makanan berlimpah bagi berbagai jenis hewan laut (*feeding ground*). Selain itu, (Sigit S, 2011) ekosistem mangrove juga dimanfaatkan sebagai tempat berlindung berbagai jenis binatang misalnya juvenile dan larva ikan (*shellfish*) dari predator, tempat memijah berbagai jenis ikan dan udang (*spawning ground*), sebagai pelindung pantai, mempercepat pembentukan lahan baru, penghasil kayu bangunan, kayu bakar, kayu arang, dan tannin (Soedjarwo, 1979). Hutan mangrove dinilai sangat penting keberadaannya karena fungsinya yang sangat beragam, diantaranya adalah sebagai pelindung pantai dari hempasan ombak dan angin kencang, penahan abrasi, penampung air hujan sehingga dapat mencegah banjir, dan penyerap limbah yang mencemari perairan.

Community Based Foresty Management (CBFM) (Nurmanaf A.R, 2008) Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) merupakan sistem pengelolaan sumberdaya hutan dengan pola kolaborasi yang bersinergi antara Perum Perhutani dan masyarakat desa hutan atau para pihak yang berkepentingan dalam upaya

mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan yang optimal dan peningkatan IPM yang bersifat fleksibel, partisipatif dan akomodatif.

Berbagai penelitian terdahulu yang digunakan seperti studi dari (Sigit S, 2011) bahwa dalam pengelolaan hutan pemda mensosialisasikan kebijakan melalui penyuluhan. Kemudian sumber daya pelaksanaan kebijakan di lapangan kuantitas kurang memadai. Penempatan pegawai pelaksana di lapangan petugas lapangan dan pengawas lapangan sudah sesuai dengan bidangnya. Selain itu studi dari (Mubyarto, 2002; Awang, 2003) membahas implementasi kebijakan dengan menggunakan teori Edwar III. Namun belum ada studi yang membahas Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Metode

Penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu usaha mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan data yang ada kemudian menganalisa data tersebut, menelitinya, (Suharsimi, 2006) menggambarkan dan menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktor yang berkaitan dengan kondisi, situasi dan fenomena yang diselidiki (Lexy J, 2009) Jenis data yang di gunakan yaitu data primer yang diperoleh dari informan secara langsung. Adapun data primer dalam penelitian ini berupa wawancara terkait variabel penelitian. Data yang dimaksud adalah semua hal yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove berbasis masyarakat. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kantor UPT KPH Bengkalis Pulau, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, Camat Kecamatan Bantan serta dengan LSM IPMPL (Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan). Sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang sudah ada, yang dikumpulkan oleh lembaga dan organisasi penyelidik sebelumnya. Dalam penelitian ini data sekunder yang dikumpulkan berhubungan dengan Jenis-jenis Program Pengelolaan hutan mangrove, anggaran yang tersedia pada pengelolaan hutan mangrove, kondisi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengelolaan hutan mangrove. Teknik Pengumpulan data antaranya wawancara, observasi dan dokumentasi. (Michael Huberman, 1992). Teknik analisis data yang di gunakan dalam analisis kualitatif memiliki empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data , penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi

Hasil dan Pembahasan

1. Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis

Kecamatan Bantan merupakan salah satu Kecamatan yang terletak dipesisir Kabupaten Bengkalis yang memiliki wilayah hutan mangrove yang cukup luas yaitu sekitar 4.584 Hektar (Tahun 2021) yang tersebar di desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Bantan Namun karena banyaknya areal lahan mangrove yang telah

mengalami pengalihfungsian baik itu untuk pembuatan jalan, perkebunan, perikanan, untuk lahan pemukiman maupun penebangan yang bersifat komersial baik yang dilakukan orang pribadi maupun pihak-pihak tertentu hutan mangrove yang ada di Kecamatan Bantan menjadi banyak berkurang. Untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih parah lagi, maka Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis telah berupaya untuk menyelamatkan komunitas mangrove yang tersebut khususnya di Kecamatan bantan terkait dengan Pengelolaan Hutan Mangrove. Masyarakat Kecamatan Bantan yang berada di kawasan pesisir, menjadi kelompok paling terdampak langsung perubahan iklim. Dampak nyata yang terjadi yaitu terjadinya abrasi yang menyebabkan ancaman bagi penduduk disekitar wilayah pesisir. Dampak ancaman yang paling nyata terjadi pada Desa Muntai Barat, Desa Muntai, dan Desa Pambang Pesisir.

Kabupaten Bengkalis dan instansi-instansi terkait baik yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui pemerintah Kecamatan Bantan. Kepala KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yaitu Agus Rianto, mengatakan bahwa:

“Sangat disayangkan sekali dalam sepuluh tahun terakhir ini wilayah yang berada di Kecamatan Bantan mengalami abrasi yang cukup mengawatirkan. Terutama yang berada di Desa Muntai, Desa Muntai Barat, dan Desa Pambang Pesisir. Bahkan abrasi setiap tahun nya terancam berkurang 30-40 meter efek dari abrasi ”. (Hasil Wawancara, 19 Oktober 2022).

Berdasarkan uraian diatas, ketiga desa ini mengalami dampak abrasi terparah, dimana garis pantai berdasarkan hasil kajian terancam berkurang 30-40 meter per tahun dampak hantaman ombak selat Melaka. Jika tidak ada upaya dari pemerintah serta dari kesadaran masyarakat akan mengancam dari segi lingkungan, perekonomian penduduk di wilayah Kecamatan Bantan.

a. Strategi Persuasif

Strategi persuasif dilakukan dalam bentuk pembinaan-pembinaan. Kegiatan pembinaan merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari kelompok sasaran terhadap pesan yang disampaikan. Materi pembinaan meliputi penyuluhan tentang pentingnya hutan mangrove dan pelestariannya, pengelolaan lingkungan serta pentingnya organisasi/ kelompok masyarakat. Pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sudah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang dilakukan melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dan instansi-instansi terkait baik yang dilakukan secara langsung kepada masyarakat maupun melalui pemerintah Kecamatan Bantan.

Menurut Mohammad Azmir yang merupakan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis mengatakan bahwa:

“Sosialisasi dan penyuluhan yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dilakukan dengan cara mengundang Kepala Desa dan tokoh masyarakat yang ada di Kecamatan Bantan serta masyarakat setempat sebagai pemanfaat mangrove atau masyarakat yang kehidupan sehari-hari sangat bergantung pada hutan mangrove yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis terutama di Kecamatan Bantan”. (Hasil Wawancara, 19 Oktober 2022).

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis juga menyampaikan himbauan-himbauan kepada masyarakat supaya menjaga kelestarian hutan mangrove dan melindungi hutan mangrove dari kerusakan-kerusakan baik disebabkan oleh faktor alam maupun akibat ulah manusia yang dilakukan melalui pemasangan pamflet atau plakat di daerah-daerah yang rentan terutama sekali di desa-desa yang berada dipinggiran pantai.

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa strategi Persuasif yang dimaksud adalah bagaimana pemerintah Kabupaten Bengkalis mensosialisasikan kebijakan tentang pengelolaan hutan khususnya hutan mangrove kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Bantan, sosialisasi ini sangat penting dilakukan karena dengan adanya sosialisasi masyarakat dapat mengetahui informasi yang jelas mengenai kebijakan yang akan diterapkan pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan Pengelolaan Hutan Mangrove berbasis masyarakat di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

b. Strategi Edukatif

Strategi Edukatif dalam pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis tidak terlepas dari faktor manusia yang berkerja dalam suatu lingkungan atau organisasi yang dapat disebut juga pegawai, karyawan, personil, dan lain lain. Sumber Daya Manusia adalah potensi yang merupakan asset yang sangat penting didalam suatu organisasi atau instansi dimana Sumber Daya Manusia sebagai unsur pelaksana dalam mencapai tujuan yang ada dalam organisasi atau instusi tersebut. Sumber Daya Manusia merupakan unsur utama dalam pelaksanaan suatu kebijakan, oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten sebagai pelaksana kebijakan, tanpa sumber daya manusia yang memadai maka implementasi suatu kebijakan tidak akan terlaksana secara efektif dan efisien. Hal ini jelas sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu kebijakan yang akan dikeluarkan pemerintah tersebut.

Menurut Kepala KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yaitu Agus Rianto, mengatakan bahwa:

“Sumber Daya Manusia yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan kurang berkualitas dan berkompeten sesuai bidangnya, dalam pelaksanaan suatu kebijakan contohnya menangani setiap permasalahan yang terjadi di lapangan misalnya hutan mangrove yang mengalami kerusakan baik oleh alam maupun manusia tidak segera ditangani dengan baik”. (Hasil Wawancara, 20 Oktober 2022).

Berdasarkan uraian diatas Sebuah Strategi Edikatif yang di lakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sudah berusaha untuk menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan namun dalam kenyataannya di lapangan sumber daya manusia yang yang ditunjuk sebagai pelaksana kebijakan dinilai kurang berkualitas kurang berkualitas dan berkompeten sesuai bidangnya. Hal tersebut terlihat dari kerja mereka yang kurang maksimal dalam menangani setiap permasalahan yang ada. Maka dari itu, pemerintah harus lebih serius dan tepat dalam menunjuk sumber daya manusia sebagai pelaksana

kebijakan untuk menangani setiap permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Bantan agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Strategi Fasilitatif

Pembentukan kelembagaan masyarakat perlu dilakukan karena melalui lembaga-lembaga swadaya yang ada di masyarakat dapat membantu pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan dan kegiatan rehabilitasi hutan oleh karena itu sudah sewajarnya pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat tersebut karena sangat banyak membantu tugas-tugas pemerintah daerah dalam hal perlindungan hutan mangrove. Selain sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan, juga harus didukung dengan penyediaan fasilitas yang di perlukan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, karena tanpa adanya Sarana dan Prasarana pendukung maka kebijakan tidak akan terlaksana secara baik.

Menurut Muthu Saily yang merupakan Camat Bantan mengatakan bahwa :

“Mengenai fasilitas yang diberikan pemerintah kepada para pelaksana kebijakan terlihat sudah cukup baik itu berupa tempat maupun alat yang digunakan. Pemerintah memberikan fasilitas cukup untuk para pelaksana kebijakan sehingga mereka bisa berkerja dengan baik, ini terlihat dari gedung yang mereka tempati sudah cukup baik. hal ini jelas mempengaruhi kerja mereka dalam menjalankan setiap kebijakan yang diperintahkan oleh atasannya”. (Hasil wawancara, 20 Oktober 2022).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis sudah menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan kebijakan seperti Reboisasi, Penghijauan, dan lain-lain. Maka oleh sebab itu sudah seharusnya para pelaksana kebijakan harus bisa berkerja.

Analisis kajian teoritis strategi fasilitatif dari wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan maka peneliti menyimpulkan bahwa penerapan strategi fasilitatif dengan memberi bantuan fasilitas sarana dan prasarana sudah dilakukan akan tetapi pemberian bantuan usaha tidak tepat sasaran dari anggaran pemerintah dengan yang dibutuhkan di lapangan. Selain itu, keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) perlu diperhatikan pemerintah karena LSM sebagai wadah penggerak dalam mengelola hutan mangrove.

2. Kendala Strategi Pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan

a. Pemahaman Pelaksana

Pemahaman dan pengetahuan para pelaksana kebijakan sangat diperlukan dalam melaksanakan kebijakan tersebut, karena tanpa adanya pemahaman dan pengetahuan yang baik tentang kebijakan yang akan dilaksanakan oleh para pelaksana niscaya kebijakan tersebut tidak akan terlaksana dengan efektif dan bahkan akan terjadi kesalahan dalam memahami maksud dari kebijakan tersebut.

Dalam hal ini, pemahaman para pelaksana Kebijakan terhadap pengelolaan Hutan Mangrove di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis belum terlaksana secara optimal mengingat masih terjadinya kerusakan mangrove akibat pengambilan secara ilegal oleh beberapa oknum yang mengakibatkan keberadaan Hutan Mangrove mengalami penyusutan.

Melalui hasil wawancara penulis dengan Kepala KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan) yaitu Abbasri mengatakan bahwa :

“Para pelaksana kebijakan yang berkerja di lapangan kurang mengetahui apa yang seharusnya dikerjakan terutama dalam mengantisipasi berkurangnya jumlah pohon mangrove, para pelaksana terlihat kebingungan saat ditanyakan bagaimana kerjasama Rill nya terkait pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat itu sendiri, dan juga mereka tidak memahami setiap pekerjaan yang dilimpahkan kepadanya sehingga tidak menghasilkan suatu kerja yang baik sesuai yang diinginkan”. (Hasil Wawancara, 20 Oktober 2022).

Analisis kajian teoritis dari konsep pemahaman Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa respon dari para pelaksana terhadap kebijakan tentang perlindungan hutan di Kecamatan Bantan berada dalam kategori Kurang Baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya respon berupa tanggapan atau reaksi dari para pelaksana kebijakan dilapangan dalam menangani segala permasalahan yang terjadi. Oleh karena itu, sudah seharusnya pemerintah memberikan respon yang baik kepada masyarakat, agar masyarakat dapat memberikan laporan dengan baik dan dapat diterima dengan baik pula oleh para pelaksana kebijakan dalam rangka pengelolaan hutan mangrove yang ada di Kecamatan Bantan.

b. Rendahnya Insentif

Insentif adalah suatu penghargaan dalam bentuk material atau non material yang diberikan oleh pihak pimpinan organisasi kepada bawahan agar mereka bekerja dengan motivasi yang tinggi dan berprestasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, dengan kata lain pemberian insentif adalah pemberian uang di luar gaji sebagai pengakuan terhadap prestasi kerja dan kontribusi pegawai kepada organisasi.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang tanggapan informan mengenai pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan perlindungan hutan mangrove Kecamatan Bantan penulis melakukan wawancara dengan informan. Berdasarkan wawancara penulis Menurut Muthu Saily yang merupakan Camat Bantan mengatakan bahwa :

“Pemberian insentif diberikan bagi para pelaksana kebijakan di lapangan yang disesuaikan dengan bidang pekerjaan mereka yang diambil dari anggaran yang telah disahkan oleh Pemerintah Kabupaten bengkalis”. (Hasl Wawancara,20 Oktober 2022).

Berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa pemberian insentif kepada para pelaksana kebijakan tentang perlindungan hutan di Kecamatan Bantan berada dalam kategori Baik. Hal ini disebabkan oleh upaya optimal pemberian intensif yang teratur dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis kepada para pelaksana kebijakan pengelolaan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Bantan. Oleh sebab itu, kebijakan yang dilaksanakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

c. Rendahnya Pengawasan

Pengawasan merupakan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan . pengawasan pada dasarnya

diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan adanya penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Menurut Solihin yang merupakan Ketua IPMPL di Kecamatan Bantan mengatakan bahwa :

“Pemerintah Kabupaten kurang mengawasi dengan baik setiap pekerjaan yang telah dikerjakan oleh para pelaksana kebijakan. Mereka terkesan kurang peduli dengan apa yang dikerjakan oleh para pelaksana kebijakan, pemerintah menyerahkan sepenuhnya setiap pekerjaan yang dibebankan kepada mereka tanpa ada proses pengawasan terhadap bagaimana kerja dan hasil pekerjaan yang mereka lakukan”. (Hasil wawancara, 20 Oktober 2022).

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan tentang perlindungan hutan di Kecamatan Bantan berada dalam kategori Kurang Baik. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mengawasi setiap kerja yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan khususnya hutan mangrove yang ada di Kecamatan Bantan.

Analisis dari konsep pengawasan dengan hasil wawancara di lapangan adalah pengawasan disini mengartikan seperti ada pemantauan secara rutin yang dilakukan oleh aparat terkait yang bertujuan untuk memantau perkembangan yang terjadi terhadap program yang sedang dijalankan oleh dinas lingkungan hidup, dan juga pengawasan disini juga akan dapat memudahkan kelompok-kelompok masyarakat pengelola hutan mangrove untuk melaporkan perkembangan terhadap kegiatan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Kesimpulan

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Bengkalis masih kurang baik, hal inilah yang menyebabkan belum adanya dampak yang signifikan terhadap kondisi hutan mangrove di Kabupaten Bengkalis antara sebelum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Bengkalis dengan setelah diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Bengkalis. Strategi pengelolaan hutan mangrove Kecamatan Bantan dilakukan melalui sosialisasi kebijakan tentang perlindungan hutan dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Hutan. Sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis melalui menteri pendidikan dan kebudayaan menteri riset, teknologi dan pendidikan tinggi, menteri agama, dan menteri dalam negeri nomor PKS.2/MENLHK/P2SDM/KUM.3/7/2016 No 11.a/M/NK/2016 No 9 Tahun 2016, No 660/2688A/SJ tentang pengembangan pendidikan lingkungan hidup dan peraturan menteri LHK No 52 tahun 2019 memberikan pemahaman kepada usia dini yang

dilakukan sosialisasi pembinaan di lingkungan sekolah, memberikan informasi mengenai pentingnya melestarikan hutan mangrove kepada masyarakat melalui papan plang iklan dan spanduk, pemberian sanksi yang tegas bagi masyarakat yang merusak hutan sesuai dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan di Kabupaten Bengkalis, melakukan pembinaan dan pelatihan bagi masyarakat dan kaum muda dalam usaha pembibitan mangrove, Mendorong Terciptanya Alternatif Mata Pencaharian Masyarakat melalui Kawasan wisata, memfasilitasi terbentuknya kelembagaan masyarakat cinta lingkungan melalui Lembaga swadaya seperti Ikatan Pemuda Melayu Peduli Lingkungan (IPMPL), peran serta Kerjasama antara pemerintah dengan mitra, perusahaan dan masyarakat.

Dalam hal penyediaan Sumber Daya, Pemerintah Kabupaten Bengkalis disarankan penulis agar menunjuk sumber daya manusia yang berkualitas sebagai pelaksana kebijakan, menyediakan fasilitas-fasilitas yang diperlukan, serta menyediakan anggaran yang memadai bagi para pelaksana kebijakan karena tanpa dukungan sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas yang memadai apapun jenis kegiatan yang dilaksanakan tidak akan terlaksana dengan baik. Untuk masyarakat disarankan supaya lebih memperhatikan kelestarian hutan mangrove yang sangat penting manfaatnya bagi kehidupan manusia dan lingkungan sekitar.

Referensi

- Afriyani, A. (2018). Pengelolaan Ekosistem Mangrove melalui pemberdayaan masyarakat pesisir. *Widyasiswara BPPP Tegal*.
- Arief, D. (2004). Penguatan Kelembagaan sosial ekonomi Masyarakat sebagai modal sosial pembangunan. *Agrimedia, Vol 9*(No 1Maret 2004).
- Awang, S. A. (2003). Politik Kehutanan Masyarakat kreasi wacana blora dalam angka tahun2010 badan pusat statistik kabupaten blora dan Bappeda Kabupaten Blora. *Kreasi Wacana Yogyakarta*.
- Chaster, B. I. (2002). Organisasi dan Manajemen Struktur, perilaku dan proses. *Gramedia*. Jakarta.
- David, F. . (2010). *Manajemen Strategi. Sebuah Pengantar*. Jakarta: Selemba Empat.
- Harry, H. (2001). Strategi Pemberdayaan Masyarakat. In *Humaniora Utama*. Jakarta: Press Bandung.
- Hendropuspita. (2000). *Sosiologi Sistemik*. Jakarta: Kanisius.
- Hery Purnobasuki. (2005). Tinjauan Perspektif Hutan Mangrove. In *Air Langga*. Surabaya: Universitas Press.
- Leo, A. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Lexy J, M. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja. Rosdakarya*.
- Mas Roro Lillik, E. (2005). *Perencanaan, implementasi & evaluasi kebijakan atau program*. Surakarta: Pustaka Cangkra.
- Michael Huberman, dkk. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press.

- Mubyarto. (2002). Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dan Peranan Ilmu- Ilmu Sosial. In *Agro Ekonomika*. Yogyakarta: Yayasan Agro Ekonomika.
- Nurmanaf A.R, D. (2008). Fenomena Perambahan Hutan Dan Perpektif Program Pengelolaa hutan bersama Hutan bersama masyarakat. *Sosial Ekonomi, Vol 8*(No 2), 71-85.
- Sigit S, N. (2011). *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui Penguatan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Sosial (Online)*. Vol 12(No 2).
- Suharsimi, A. (2006). Prosedur Penelitian : Suatu pendekatan. In *Rineka Cipta*. Jakarta: Prenada Media.
- Sundawati L, D. (2016). *Pengelolaan Hutan Kemitraan untuk mensejahterakan rakyat (Khusus PHBM di Perhutani BKPH Parung Panjang)*.